

KETERKAITAN SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR PARIWISATA DALAM PEREKONOMIAN BALI

I Made Adnyana*

Abstract

The study is aimed at prospect for linkages of agricultural sector and tourism industry in Bali that may promote economic growth. Tools of analyses used in the study is SAM (Social Accounting Matrix). The study has come to the finding that of the other sub-sectors in agriculture, the following sub-sectors show high rate multiple coefficient of linkage—cattle breeding, food plants, fishing; and that of the other sub-sectors in tourism industry, the followings show high rate of linkage—food industry, beverage and tobacco, restaurant and culture attractions. The sub-sectors having the least rate of linkage are jewelry, crafts industry, mining and hotels.

Keywords : agriculture, tourism, linkages

1. Pendahuluan

Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, dengan sumbangan terhadap PDB nasional sebesar 8,47 persen (BPS, 2008). Kontribusi ini terutama berasal dari sektor pariwisata, sebagaimana diketahui bersama bahwa pariwisata di Bali merupakan unggulan pariwisata nasional. Oleh karenanya pengembangan pariwisata di Bali tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, namun juga perlu mendapat perhatian utama dari Pemerintah Pusat.

Disamping sektor pariwisata, sektor pertanian juga memainkan peranan penting dalam perekonomian Provinsi Bali. Berdasarkan data Provinsi Bali Dalam Angka tahun 2011 dapat diungkapkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Bali pada tahun 2010 sebesar 19 persen, menurun 1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor pariwisata memberikan kontribusi 33 persen terhadap PDRB Provinsi Bali pada tahun 2010, meningkat 1 persen dibandingkan sektor lainnya. Kontribusi sektor lainnya, merupakan gabungan dari berbagai sektor, cukup tinggi, yakni sebesar 48 persen selama 3 tahun terakhir (periode 2008-2010).

Kondisi yang relatif berbeda apabila dilihat kontribusi sektoral dari aspek kesempatan kerja. Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pertama dari aspek kesempatan kerja, sedangkan sektor pariwisata menempati peringkat kedua. Pada tahun 2008, kontribusi sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja sebesar 36 persen, terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yakni menjadi sebesar 25 persen pada tahun 2010. Sebaliknya kontribusi

* Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Nasional

sektor pariwisata dan sektor lainnya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2008, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Bali sebesar 24 persen, secara konsisten mengalami peningkatan, yakni menjadi 27 persen pada tahun 2011. Selanjutnya, kontribusi sektor lainnya terhadap PDRB Provinsi Bali pada tahun 2008 sebesar 40 persen, terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2011 kontribusinya menjadi 48% (BPS Provinsi Bali 2011).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, terlihat bahwa struktur perekonomian Bali mempunyai karakteristik yang unik dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Perekonomian Bali dibangun dengan mengandalkan industri pariwisata sebagai *leading sector* dari aspek PDRB (pertumbuhan ekonomi) dan sektor pertanian merupakan sektor yang dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar dan secara langsung dapat mendukung industri pariwisata tersebut.

Aspek penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan ekonomi adalah pemerataan pendapatan. Para pemikir aliran Strukturalis menyatakan bahwa pemerataan pendapatan yang lebih adil di negara-negara sedang berkembang tidak dapat dinomorduakan, karena hal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa (Todaro, 2000): *Pertama*, kesenjangan yang besar dan kemiskinan yang meluas telah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap kredit, tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya dan memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. *Kedua*, masyarakat yang berpendapatan tinggi di negara-negara sedang berkembang tidak dapat sepenuhnya diharapkan untuk menabung dan menanamkan modalnya dalam perekonomian domestik. *Ketiga*, rendahnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat miskin yang terwujud berupa kondisi kesehatan yang buruk, kurang gizi dan pendidikan yang rendah, justru menurunkan produktivitas mereka sehingga mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. *Keempat*, upaya-upaya untuk menaikkan tingkat pendapatan penduduk miskin akan merangsang permintaan terhadap produk-produk domestik daripada golongan masyarakat kaya yang cenderung membelanjakan pendapatannya pada barang-barang impor yang serba mewah. Dan *kelima*, terciptanya distribusi pendapatan yang lebih adil melalui upaya-upaya pengentasan kemiskinan akan memberikan banyak insentif materil dan psikologis sehingga mempercepat kemajuan ekonomi.

Besaran kontribusi sektor pertanian dan sektor pariwisata di Bali berdasarkan perhitungan pangsa PDRB dan pangsa kesempatan kerja yang telah dijelaskan di atas belum secara penuh dapat memberikan rekomendasi bahwa kedua sektor tersebut merupakan sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi Bali. Secara teoretis, perhitungan kontribusi berdasarkan pangsa sektoral hanya menggambarkan efek langsung (*direct effect*) dari pengembangan suatu sektor. Dalam kerangka pemikiran ekonomi regional suatu sektor dinyatakan sebagai sektor prioritas (sektor andalan) diukur oleh *total effect* (efek total). Total efek

merupakan penjumlahan dari nilai *direct effect* dan *indirect effect* (efek tidak langsung).

Sektor prioritas perlu ditetapkan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam rangka untuk menetapkan besarnya sumberdaya yang harus dialokasikan (stimulus ekonomi oleh pemerintah) didasarkan pada pertimbangan adanya *constraint* (keterbatasan) sumberdaya yang dimiliki. Untuk memahami konsep ini, pendekatan teori *unbalanced growth theory* (teori pertumbuhan tidak seimbang) yang dikemukakan oleh Hirschman. Teori pertumbuhan tidak seimbang merupakan suatu strategi yang mengembangkan sektor yang memiliki keterkaitan kuat, baik keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) maupun keterkaitan ke depan (*forward linkage*). Menurut Hirschman dalam Jhingan (2003) dan Arief (1998) investasi pada industri atau sektor-sektor perekonomian yang strategis dan berhubungan satu dengan yang lain melalui keterkaitan (*linkage*) akan menghasilkan kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan ini dapat dinyatakan bahwa sektor pertanian dan sektor pariwisata merupakan sektor andalan di Provinsi Bali masih merupakan sebuah hipotesis. Untuk itu pertanyaan dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut: *Berapa besar tingkat keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor pariwisata?*

Secara umum tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis peranan sektor pertanian dan sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Menganalisis keterkaitan antarsektor dalam perekonomian provinsi Bali, terutama sektor pertanian dan pariwisata.

II. Landasan Teori

Sir Roy Harrod dari Inggris dan E. Domar dari Amerika mencetuskan konsep pertumbuhan berimbang (eksponensial). Teori tersebut mencakup penjelasan tentang tingkat pertumbuhan alamiah jangka panjang. Analisis Harrod-Domar memberikan peranan penting kepada akumulasi modal dalam proses pertumbuhan ekonomi secara terus menerus, tetapi mereka menekankan bahwa akumulasi modal itu mempunyai peranan ganda, yaitu di satu pihak investasi menghasilkan pendapatan dan di lain pihak investasi akan menambah kapasitas produksi perekonomian.

Selanjutnya dalam model pembangunan menurut Harrod-Domar, penambahan pendapatan nasional dihubungkan dengan pembentukan modal, hasrat marginal untuk menabung (*marginal propensity to save/ MPS*), dan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* ke dalam suatu kesatuan hubungan ekonomi. Tingkat pembangunan ekonomi (*rate of development*) ditentukan oleh hubungan antara pembentukan modal (*capital formation*), laju pertumbuhan penduduk (*rate of population growth*) dan rasio modal-output (*COR*). Dari model tersebut nampak jelas bahwa dalam pembangunan, seolah-olah hanya modal yang dianggap sebagai parameter yang strategis, sedangkan faktor-faktor produksi lainnya dan berbagai variabel lainnya dianggap konstan.

II.1. Model Pertumbuhan Tidak Seimbang

Pada hakikatnya konsep pertumbuhan tidak seimbang adalah suatu strategi yang mengembangkan sektor yang memiliki keterkaitan kuat. Menurut teori keterkaitan ini yang dimaksud adalah meliputi keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan ke depan (*forward linkage*). Usulan untuk mengembangkan sektor ekonomi yang memiliki keterkaitan ini berlaku tidak hanya pada sektor industri dan sektor pertanian tetapi juga untuk keseluruhan sektor ekonomi. Menurut Hayami dan Ruttan (1971) konsep ketidakseimbangan dalam dan antarsektor pertanian adalah suatu sumber penting dari keterkaitan ke belakang dan ke depan dalam mentransmisikan kemajuan teknologi di dalam sektor pertanian terhadap keseluruhan pembangunan ekonomi.

Saling ketergantungan antarsektor dapat dirumuskan dalam tiga jenis efek keterkaitan, yaitu: (1) efek keterkaitan antar industri (*interindustry linkage effect*), mengukur efek peningkatan satu unit permintaan akhir (*final demand*) terhadap tingkat produksi dalam setiap sektor, (2) efek keterkaitan antar tenaga kerja (*employment linkage effect*), mengukur penggunaan total tenaga kerja dalam satu sektor sebagai akibat perubahan satu unit permintaan akhir, dan (3) efek keterkaitan penciptaan pendapatan (*income generation linkage effect*), mengukur efek perubahan salah satu variabel eksogen dalam permintaan akhir terhadap peningkatan pendapatan (Chenery dan Clark, 1959 dalam Ginting, 2006).

II.2. Ekonomi Pariwisata

Ekonomi pariwisata adalah suatu besaran ekonomi yang diciptakan oleh transaksi yang dilakukan antara para wisatawan (terkait dengan pengeluaran belanja wisata) dengan sektor-sektor ekonomi penyedia barang dan jasa. Australian Bureau of Statistics, ABS (1994) membagi ekonomi pariwisata dimaksud dalam tiga elemen, yaitu : (1) wisatawan, dalam hal ini diperlakukan sebagai konsumen yang mengkonsumsi barang dan jasa selama melakukan perjalanan wisata, (2) transaksi untuk memperoleh barang dan jasa dimaksud baik dalam perjalanan maupun di tempat tujuan wisata, dan (3) sektor/unit ekonomi yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kegiatan wisata.

III. Metodologi Penelitian

III.1. Kerangka Dasar SAM

Salah satu tujuan menyusun SAM adalah untuk memperluas gambaran sistem pendapatan nasional (*System of National Account*, SNA) dengan cara menggabungkan SNA dengan data distribusi pendapatan. Dalam pengertian ini, SAM memberikan sebuah metode yang bisa mengubah SNA dari statistik produksi menjadi statistik pendapatan, dengan cara demikian akhirnya SAM itu lebih terfokus kepada pembahasan mengenai tingkat kesejahteraan dari kelompok-kelompok sosial ekonomi yang berbeda (McGrath, 1987, dalam Arief Daryanto, 2010).

Ada enam tipe neraca dalam sebuah matriks SAM yang lengkap antara lain: (1) aktivitas, (2) komoditas, (3) faktor-faktor produksi (tenaga kerja dan modal), (4) institusi domestik yang terdiri dari rumah tangga, perusahaan,

pemerintah, (5) modal, dan (6) *rest of the world* (Sadoulet dan de Janvry, 1995; dan Thorbecke, 2001). Lima neraca pertama dikelompokkan sebagai neraca endogen, sedangkan neraca keenam menjadi neraca eksogen yang dapat mempengaruhi besar kecilnya perubahan neraca endogen ketika dilakukan injeksi pada neraca tersebut. Ke lima neraca tersebut dapat dilihat dalam kerangka dasar SAM Indonesia

III.2. Tahapan Membangun SAM Provinsi Bali

Dalam studi ini analisis data dilakukan dari aspek ekonomi regional dengan menggunakan Model *Social Accounting Matrix* (SAM) atau analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SAM). Dengan metode ini juga selanjutnya akan dilakukan analisis simulasi kebijakan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian dan sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan rumah tangga di Provinsi Bali. Klasifikasi SAM Provinsi Bali tahun 2007 dapat dilihat dalam Tabel berikut: Klasifikasi SAM Provinsi Bali Tahun 2007

Uraian				Kode
Faktor Produksi	Tenaga kerja	Pertanian	Penerima upah/gaji	1
			Bukan penerima upah/gaji	2
		Produksi, operator alat angkut, operator angkutan dan buruh kasar	Penerima upah/gaji	3
			Bukan penerima upah/gaji	4
		Tata usaha, penjualan, jasa-jasa	Penerima upah/gaji	5
			Bukan penerima upah/gaji	6
		Kepemimpinan, ketatalaksanaan, militer, profesional dan teknisi	Penerima upah/gaji	7
			Bukan penerima upah/gaji	8
	Bukan Tenaga Kerja			9
Institusi	RT Buruh Tani			10
	RT Pengusaha Pertanian			11
	RT Gol. Rendah di Desa			12
	RT Penerima Pendapatan di Desa			13
	RT Gol. Atas di Desa			14
	RT Gol Rendah di Kota			15
	RT Penerima Pendapatan di Kota			16
	RT Gol. Atas di Kota			17
	Perusahaan			18
	Pemerintah			19
Sektor Produksi	Tanaman bahan makanan			20
	Perkebunan			21
	Peternakan			22
	Kehutanan			23

	Perikanan	24
	Pertambangan	25
	Industri makanan, minuman dan tembakau	27
	Industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang dari kulit	28
	Industri kayu	29
	Industri kertas, barang dari kertas dan karton	30
	Industri kimia, brg dr kimia, karet dan plastik	31
	Bahan bakar minyak	32
	Industri kerajinan dari bahan galian	33
	industri karoseri dan alat angkuta	34
	Industri barang perhiasan	35
	Listrik dan Air minum	36
	Bangunan	37
	Perdagangan	38
	Restoran, rumah makan, warung	39
	Hotel bintang	40
	Anghutan umum darat dan angkutan darat lainnya	41
	Angkutan laut antar pulau/negara	42
	Angkutan udara	43
	Travel biro	44
	Komunikasi, pos, giro	45
	Perbankan	46
	Jasa Pemerintahan Umum	47
	Atraksi budaya	48
Lainnya	Neraca Kapital	49
	Pajak Tidak langsung	50
	Luar Negeri	51

III.3. Metode Analisis

Kerangka SAM dapat digunakan sebagai kerangka data yang menjelaskan mengenai (BPS, 1995 dan 1999): *Pertama*, kinerja pembangunan ekonomi suatu negara, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), konsumsi, tabungan dan lainnya. *Kedua*, distribusi pendapatan faktorial, yaitu distribusi pendapatan yang dirinci menurut faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal. Distribusi pendapatan faktorial dalam kerangka SAM ditunjukkan oleh baris neraca pertama pada kerangka umum SAM. *Ketiga*, distribusi pendapatan rumahtangga yang dirinci menurut berbagai golongan pendapatan. *Keempat*, pola pengeluaran rumahtangga (*household expenditure pattern*). Pola pengeluaran menurut golongan rumahtangga dalam kerangka SAM dapat dilihat pada neraca kolom masing-masing golongan rumahtangga. Dan *kelima*, distribusi tenaga kerja menurut sektor atau lapangan usaha dimana mereka yang bekerja termasuk distribusi pendapatan tenaga kerja yang mereka peroleh sebagai balas jasa tenaga kerja yang mereka sumbangkan. akan memberikan

masuk mengenai kondisi sosial masyarakat, yaitu distribusi tenaga kerja dan tingkat upah dan gaji menurut sektor-sektor ekonomi yang dianalisis.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

IV.1. Keterkaitan Sektor Pertanian dan Sektor Pariwisata dalam Struktur Perekonomian Provinsi Bali

Tabel 4.1, menyajikan hasil analisis pengganda output bruto, pengganda keterkaitan (ke depan dan ke belakang), pengganda nilai tambah, dan pengganda faktor produksi (tenaga kerja dan kapital). Koefisien pengganda output bruto seluruh sektor selalu lebih besar dari satu. Hal ini mengindikasikan bahwa injeksi sebesar 1 miliar rupiah pada setiap sektor akan meningkatkan output bruto masing-masing sektor lebih besar dari 1 miliar rupiah.

Tabel 4.1. Koefisien Pengganda Output, Keterkaitan, Nilai Tambah dan Faktorial di Provinsi Bali Tahun 2007

No	Sektor	Output	Keterkaitan		Nilai Tambah	Faktorial	
			Ke Depan	Ke Belakang		Tenaga Kerja	Kapital
A.	Pertanian						
1	Tanaman bahan makanan	10.21	5.32	2.15	1.55	0.29	1.25
2	Perkebunan	3.10	2.01	2.44	1.58	0.37	1.21
3	Peternakan	12.81	6.42	3.55	1.68	0.50	1.18
4	Kehutanan	1.18	1.14	2.55	1.70	0.49	1.20
5	Perikanan	5.08	2.77	2.93	1.66	0.62	1.04
B.	Pariwisata						
6	Restoran, dan rumah makan	7.13	4.02	3.22	1.61	0.46	1.15
7	Hotel	2.13	1.62	2.92	1.61	0.49	1.12
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	8.90	4.64	3.30	1.60	0.41	1.19
9	Industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang dari kulit	3.64	2.54	3.63	1.73	0.60	1.13
10	Industri kerajinan dari bahan galian	1.64	1.50	3.29	1.71	0.59	1.12
11	Industri barang perhiasan	1.92	1.61	2.97	1.31	0.45	0.87
12	Travel biro	2.48	1.88	2.91	1.61	0.48	1.13
13	Atraksi budaya	6.56	3.99	2.89	1.73	0.59	1.14
C.	Lainnya						
14	Perdagangan	10.66	6.38	3.16	1.72	0.67	1.05
15	Pertambangan	1.51	1.43	2.79	1.89	0.73	1.16
16	Industri kayu	3.58	2.73	3.39	1.65	0.54	1.10
17	Industri kertas, barang dari kertas dan karton	2.75	2.33	3.46	1.64	0.53	1.11
18	Industri kimia, brg dr kimia, karet dan plastik	3.25	2.47	3.51	1.61	0.58	1.02
19	Bahan bakar minyak	5.31	3.75	1.00	0.00	0.00	0.00
20	industri karoseri dan alat angkutan	2.71	2.10	2.70	1.49	0.42	1.07
21	Listrik dan Air minus	4.28	2.72	2.95	1.67	0.54	1.13
22	Bangunan	2.89	2.18	3.59	1.70	0.63	1.06
23	Angkutan umum darat dan angkutan darat lainnya	4.73	2.81	2.91	1.57	0.49	1.07

24	Angkutan laut antar pulau/negara	1.68	1.36	2.81	1.59	0.53	1.06
25	Angkutan udara	5.45	3.19	3.10	1.58	0.48	1.10
26	Komunikasi, pos, giro	3.67	2.37	2.76	1.55	0.40	1.15
27	Perbankan	9.02	4.88	2.47	1.54	0.33	1.21
28	Jasa Pemerintahan Umum	5.08	3.04	3.84	2.43	1.32	1.11

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 4.1 juga dapat dilihat dari koefisien pengganda output bruto sektor yang memiliki koefisien tertinggi berturut-turut dari sektor pertanian adalah subsektor peternakan, subsektor tanaman bahan makanan dan yang ketiga adalah subsektor perikanan. Kemudian dari sektor pariwisata adalah subsektor industri makanan, minuman dan tembakau, subsektor restoran dan rumah makan, dan subsektor atraksi budaya.

Berbagai subsektor di sektor pertanian memiliki koefisien pengganda output bruto berkisar antara 1.18-12.81. Koefisien-koefisien pengganda ini memberi arti bahwa peningkatan pendapatan sebesar 1 miliar rupiah di sub-sub sektor pertanian tersebut akan meningkatkan output bruto sebesar 1.18 – 12.81 miliar rupiah.

Subsektor peternakan memiliki koefisien pengganda output bruto lebih besar daripada subsektor pertanian lainnya, adapun yang terendah adalah subsektor kehutanan. Subsektor kehutanan memiliki koefisien pengganda output bruto sebesar 1.18, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan sebesar 1 miliar rupiah di subsektor kehutanan tersebut akan meningkatkan output bruto sebesar 1.18 miliar rupiah. Adapun untuk sektor pertanian dan sektor pariwisata setiap peningkatan pendapatan sebesar 1 miliar rupiah akan meningkatkan output bruto juga sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan pada sektor hilir dari sektor pertanian dan pariwisata ini, yaitu industri pengolahan produk pertanian dan sub-subsektor pariwisata setiap peningkatan pendapatan sebesar 1 miliar rupiah di subsektor pertanian dan pariwisata akan meningkatkan output bruto juga sebesar koefisien masing-masing subsektornya dikalikan dengan 1 miliar rupiah.

Berdasarkan koefisien pengganda keterkaitan ke depan berturut-turut subsektor peternakan, subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor perikanan dari sektor pertanian dan subsektor industri makanan, minuman dan tembakau, subsektor restoran dan atraksi budaya dari sektor pariwisata memiliki koefisien tertinggi dibandingkan dengan sektor sektor lainnya. Sedangkan subsektor dari sektor pertanian yaitu kehutanan dan perkebunan, serta subsektor dari sektor pariwisata yaitu industri barang perhiasan, industri kerajinan dari bahan galian dan hotel mempunyai koefisien pengganda keterkaitan ke depan terkecil dibandingkan subsektor lainnya.

Dari sisi koefisien pengganda keterkaitan ke belakang berturut-turut subsektor dari sektor pertanian yaitu peternakan, perikanan dan kehutanan, sedangkan subsektor dari sektor pariwisata, yaitu industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang dari kulit, industri makanan, minuman dan tembakau, restoran dan industri kerajinan dari bahan galian memiliki koefisien tertinggi di bandingkan dengan sub-subsektor lainnya. Pada sektor pertanian koefisien pengganda

keterkaitan ke depan berkisar antara 1.14 – 6.42, sedangkan koefisien pengganda keterkaitan ke belakang berkisar antara 2.15 – 3.55. Sedangkan dari sektor pariwisata keterkaitan ke depan berkisar 1.50 - 4.64, sedangkan keterkaitan ke belakang berkisar 2.89 - 3.63. Subsektor peternakan memiliki koefisien pengganda keterkaitan ke depan yang lebih besar daripada subsektor pertanian lainnya, sedangkan yang terendah adalah subsektor kehutanan.

Dalam hal keterkaitan ke belakang di Provinsi Bali untuk sektor pertanian dan sektor pariwisata masing-masing menduduki urutan kedua, keempat dan kedelapan di antara ke 28 sektor lainnya. Hampir semua dari subsektor pertanian dan pariwisata mempunyai koefisien lebih dari satu atau diatas rata-rata.

Dari aspek pengganda nilai tambah, pada sektor pertanian yang memiliki nilai tertinggi adalah subsektor kehutanan, subsektor peternakan dan subsektor perikanan, berturut-turut sebesar 1.70, 1.68, dan 1.66. Untuk sektor pariwisata subsektor yang memiliki pengganda nilai tambah tertinggi adalah subsektor industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang dari kulit, subsektor atraksi budaya dan subsektor industri kerajinan dari bahan galian, berturut-turut sebesar 1.73, 1.73 dan 1.71. Sementara itu, subsektor tanaman bahan makanan dari sektor pertanian dan subsektor industri barang perhiasan dari sektor pariwisata yang memiliki koefisien pengganda nilai tambah yang paling rendah dibandingkan dengan subsektor pertanian dan pariwisata lainnya.

Untuk sektor lainnya, koefisien nilai tambah subsektor perdagangan, subsektor pertambangan dan subsektor jasa pemerintahan umum masih lebih tinggi dari subsektor lainnya, namun sedikit lebih kecil dari industri makanan, minuman dan tembakau. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengembangan sektor pertanian dan sektor pariwisata sangatlah tepat bagi perekonomian Provinsi Bali mengingat komoditas ini mempunyai koefisien pengganda nilai tambah yang tinggi, bahkan untuk subsektor peternakan dan industri tekstil, pakaian jadi alas kaki dan barang dari kulit mempunyai nilai tertinggi dibandingkan 28 sektor perekonomian lainnya.

Dari aspek pengganda faktor produksi, subsektor pertanian secara keseluruhan, kecuali pada subsektor perkebunan dan subsektor dari sektor pariwisata, memiliki koefisien pengganda kapital yang lebih besar dari koefisien pengganda tenaga kerja. Mengacu pada pemaparan hasil analisis dari Tabel 4.1 dapat diuraikan dengan jelas urutan subsektor yang menempati urutan teratas sampai terbawah apabila dilakukan perankingan. Hasil ranking subsektor berdasarkan koefisien pengganda output bruto, keterkaitan dan nilai tambah disajikan pada Tabel 4.2.

Mengacu pada 10 subsektor yang menempati ranking teratas dapat dinyatakan bahwa pada sektor pertanian ada dua subsektor yang termasuk dalam 10 ranking teratas, yakni subsektor peternakan (ranking 1) dan subsektor perikanan (ranking 8). Untuk sektor pariwisata ada empat subsektor, yakni subsektor industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang dari kulit (ranking 4), subsektor industri makanan, minuman dan tembakau (ranking 5), subsektor atraksi budaya (ranking 6), dan subsektor restoran dan rumah makan (ranking 7). Selanjutnya, untuk sektor pariwisata ada tiga subsektor yang termasuk dalam 10

subsektor yang menempati ranking teratas, yakni subsektor perdagangan (ranking 2), subsektor jasa pemerintahan umum (ranking 3), dan subsektor industri kayu (ranking 9).

Tabel 4.2. Ranking Sektor Produksi Berdasarkan Koefisien Pengganda Output Bruto, Keterkaitan dan Nilai Tambah di Provinsi Bali Tahun 2007

No	Sektor Produksi	Output	Keterkaitan		Nilai tambah	Total	Ranking
			Ke Depan	Ke Belakang			
A Pertanian							
1	Tanaman bahan makanan	3	3	27	24	57	14
2	Perkebunan	18	21	26	20	85	24
3	Peternakan	1	1	4	9	15	1
4	Kehutanan	28	28	24	7	87	25
5	Perikanan	10	12	15	11	48	8
B Pariwisata							
6	Restoran, dan rumah makan	6	6	10	17	39	7
7	Hotel	23	23	16	16	78	23
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	5	5	8	18	36	5
9	Industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang dari kulit	15	15	2	3	35	4
10	Industri kerajinan dari bahan galian	26	25	9	6	66	18
11	Industri barang perhiasan	24	24	13	27	88	26
12	Travel biro	22	22	18	14	76	21
13	Atraksi budaya	7	7	19	4	37	6
C Lainnya							
14	Perdagangan	2	2	11	5	20	2
15	Pertambangan	27	26	21	2	76	20
16	Industri kayu	16	13	7	12	48	9
17	Industri kertas, barang dari kertas dan karton	20	18	6	13	57	15
18	Industri kimia, brg dr kimia, karet dan plastik	17	16	5	15	53	13
19	Bahan bakar minyak	9	8	28	28	73	19
20	Industri karoseri dan alat angkutan	21	20	23	26	90	27
21	Listrik dan Air minus	13	14	14	10	51	12
22	Bangunan	19	19	3	8	49	10
23	Anghutan umum darat dan angkutan darat lainnya	12	11	17	22	62	17
24	Angkutan laut antar pulau/negara	25	27	20	19	91	28
25	Angkutan udara	8	9	12	21	50	11
26	Komunikasi, pos, giro	14	17	22	23	76	22
27	Perbankan	4	4	25	25	58	16
28	Jasa Pemerintahan Umum	11	10	1	1	23	3

Dengan memperhatikan temuan temuan di atas maka pembangunan ekonomi di Provinsi Bali dapat menyandarkan prioritas pengembangannya pada sub-subsektor peternakan, tanaman bahan makanan, industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang dari kulit, restoran dan rumah makan dan atraksi budaya. Hal ini tercermin dari rekapitulasi sektor/subsektor yang memiliki koefisien pengganda output, keterkaitan, nilai

tambah dan faktor produksi terbesar di Provinsi Bali Tahun 2007 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3. Rekapitulasi Sektor yang Memiliki Koefisien Pengganda Output, Keterkaitan, Nilai Tambah dan Faktor Produksi Terbesar di Provinsi Bali Tahun 2007

Sektor	Output Bruto	Keterkaitan		Nilai Tambah	Faktor Produksi	
		Ke Depan	Ke Belakang		Tenaga Kerja	Kapital
Pertanian	Peternakan	Peternakan	Peternakan	Kehutanan	Peternakan	Tanaman bahan makanan
Pariwisata	Industri makanan, minuman dan tembakau	Industri makanan, minuman dan tembakau	Industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang dari kulit	Industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang dari kulit	Industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang dari kulit	Restoran dan rumah makan
Lainnya	Perdagangan	Perdagangan	Jasa pemerintahan umum	Jasa pemerintahan umum	Jasa pemerintahan umum	Perbankan

5. Kesimpulan Dan Implikasi Kebijakan

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata masih memegang peranan yang dominan dalam pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang lebih merata dalam perekonomian Provinsi Bali. Namun dalam penyerapan tenaga kerja masih lebih rendah dari sektor pertanian. Walaupun sektor pariwisata masih tetap mendominasi dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan, kontribusi sektor pertanian ini tidak perlu diragukan. Sektor pertanian telah teruji pada masa krisis 1998 sampai pada perbaikan ekonomi pada saat itu, sektor ini sangat berperan untuk mengatasi krisis tersebut.

Secara spesifik dari hasil analisis dalam studi ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil analisis pada pengganda output bruto subsektor yang memiliki koefisien tertinggi, dari sektor pertanian adalah subsektor peternakan, subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor perikanan. Dari sektor pariwisata adalah subsektor industri makanan, minuman dan tembakau, subsektor restoran dan rumah makan, dan subsektor atraksi budaya.
2. Hasil analisis pengganda keterkaitan ke depan yang mempunyai nilai lebih dari satu yang tertinggi, dari sektor pertanian adalah subsektor peternakan, subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor perikanan. Kemudian dari sektor pariwisata adalah, subsektor industri makanan, minuman dan tembakau, subsektor restoran dan rumah makan serta atraksi budaya.

3. Hasil analisis pengganda keterkaitan ke belakang yang mempunyai nilai lebih dari satu yang tertinggi, dari sektor pertanian yaitu subsektor peternakan, subsektor perikanan dan subsektor kehutanan. Kemudian dari sektor pariwisata, adalah subsektor industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang dari kulit, subsektor industri makanan, minuman dan tembakau, subsektor restoran dan rumah makan, serta subsektor industri kerajinan dari bahan galian.

5.2. Implikasi Kebijakan

Pembangunan ekonomi Provinsi Bali tahun 2007 yang ditinjau berdasarkan kegiatan sektoral masih diprioritaskan pada sektor pariwisata. Hal itu pada gilirannya akan memberikan dampak terhadap peran sektor-sektor ekonomi lainnya. Studi ini menunjukkan bahwa dua sektor yang memperlihatkan peran besar di provinsi Bali sampai tahun 2007, sektor pertanian yang mencakup subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan dan subsektor perikanan. dan sektor pariwisata yang mencakup subsektor industri makanan, minuman dan tembakau, subsektor industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang dari kulit, subsektor industri kerajinan dari bahan galian, subsektor industri barang perhiasan, subsektor restoran dan rumah makan, subsektor hotel, subsektor travel biro dan subsektor atraksi budaya.

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa implikasi kebijakan dalam studi ini. Dari aspek makroekonomi, *pertama*, memberikan stimulus ekonomi berupa suntikan dana dalam menumbuh kembangkan sektor pertanian dan pariwisata melalui investasi pemerintah dan swasta. Untuk menciptakan dan mendorong pihak swasta menginvestasikan dananya perlu diberikan kemudahan dalam bentuk *data base*, penyediaan infrastruktur, kemudahan sistem administrasi birokrasi, dan kemudahan pajak. *Kedua*, memberlakukan kebijakan suku bunga pinjaman (kredit) lunak, dengan mendorong pihak perbankan dalam melakukan fungsinya dengan sungguh-sungguh. *Ketiga*, kebijakan-kebijakan yang nyata seperti kebijakan pupuk, pembinaan, pembibitan, melindungi para petani dari tengkulak dan memberikan perlindungan tentang harga hasil pertanian, serta pemerintah tidak perlu melakukan impor produk-produk hasil pertanian. Kebijakan-kebijakan yang nyata untuk sektor pariwisata terutama subsektor restoran dan rumah makan, subsektor hotel dan subsektor travel biro, dengan kebijakan perpajakan, merasionalisasi struktur regulasi dan insentif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. 2000. *Impact of Agriculture Trade and Subsidy Policy on The Macroeconomy , Distribution, and environment in Indonesia: A Strategy for Future Industrial Development*. The Developing Economies, 38 (4) 547 – 571.
- Adelnan, I. 1995. *Institution and Development Strategies. The Selected Essay of Irma*. University of California Press. Barkley.
- Adelman, I. and S. Vogel. 1991. *The Relevance of ADLI to Sub-Saharan Africa. Working Paper No. 590*. Department of Agricultural and Resource Economics, University of California, California.
- Adisasmita, R. 2008. *Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori*. Graha Ilmu Yogyakarta, Edisi Pertama.
- Alderman, H. and M. Garcia. 1993, *Poverty, Household Food Security, and Nutritional in Rural Pakistan*. Research Report 96 International Food Policy Research Institute, Washington, DC.
- Anonim, 1989, : Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 -1993 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1988 . Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
- Anonim, 2008. Data Kepariwisata. 2008. Data Perbandingan Pariwisata Bali 1989 dan 2008 Dinas Pariwisata Tingkat I Bali, Nitimandala Renon Denpasar.
- Antara, M. 1999. *Dampak Pengeluaran Pemerintah dan Wisatawan terhadap Kinerja Perekonomian Bali: Pendekatan Social Accounting Matrix*. Desertasi Doktor. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Anwar, M.A. 1983. *Pertumbuhan Pertanian dilihat dari Pertumbuhan Produk Domestik Bruto di Indonesia, 1960-1980*. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Asia - Pacific Economic Cooperation Tourism Working Group. 2002. *Best Practice in Tourism Satellite Account Development in APEC member Economies*. APEC Secretariat , Alexandra Point, Singapore.

- Australian Bureau of Statistics. 1994. *Framework for the Collection and Publication of Tourism Statistics*. Australian Bureau of Statistics, Canberra.
- Azis, I. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Hasil Registrasi Penduduk Provinsi Bali. 2008.
- Badan Pusat Statistik. Provinsi Bali. 2009. Bali dalam Angka; Survey Kepariwisata di Bali 2004-2008. Lama Tinggal, Pengeluaran Wisatawan, dan Karakteristik Wisatawan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2009. Bali dalam Angka; Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 2004 – 2008.
- Badan Pusat Statistik Jakarta. 2003. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2000.
- Badan Pusat Statistik Jakarta. 2005. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2005.
- Budiharsono, S. 1996. *Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi antar Daerah di Indonesia, 1969-1987*. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Chung – I Li, Jennifer. 2006 : *A 1998 Social Accounting Matrix (SAM) For Thailand*, University of North Carolina at Chapel Hill, International Food Policy Research Institute.
- Cohen, S. I. 1989. *Multiplier Analysis In Social Accounting Matrix and Input Output Framework Eviden For Several Countries*. In *Frontier of Input-Output Analysis* (Edited by Miller, R.E. Poleske, and A Rose) Oxford University Press. New York, PP 78 – 99.
- Cooper , C and J. Fletcher. 1993 *Tourism, Principles & Practice Longman Group, Limited, Essex*.
- Damanik, J. 2010. Merancang Format Baru Pariwisata yang Menyejahterakan Rakyat.
- Daryanto, A, Hafizrianda, Y. 2010. Analisis Input-Output & *Social Accounting Matrix*, untuk Pembangunan Ekonomi Daerah, Penerbit IPB Press, Cetakan Pertama, 2010. Bogor.

- De Janvry, A. and E. Sadoulet. 1986. *Agricultural Growth in Developing Countries and Agricultural Imports: Econometric and General Equilibrium Analysis*. Working Paper No. 424. Department of Agricultural and Resource Economics, University of California. California.
- Department of Culture and Tourism. 2007. Bali Tourism Satellite Account.
- Dinas Pariwisata Provinsi Bali. 2008. Bali Tourism Statistics.
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Pembangunan*. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Ghalib, R. 2005. *Ekonomi Regional*, edisi pertama, Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Ginting, R. 2006. *Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan dan Distribusi Pendapatan di Sumatera Utara: Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi*. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Glasson, J. terjemahan Aris Yakub (1990). *Pengenalan Perencanaan Wilayah, Konsep Teori, dan Amalan*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur.
- Greenfield, C.C. 1985. *A Social Accounting Matrix for Botswana 1974 – 1975*, in *Social Accounting Matrix, A Basic for Planning*. Edited by Pyat and Round. A World Bank Symposium. PP 126 – 144.
- Hall, C.M. 1994. *Tourism in the Pacific Rim: Development, Impacts and Markets*. Longman Australia Pty Ltd, Melbourne.
- Hafizrianda, Y. 2007. *Dampak Pembangunan Sektor Pertanian terhadap Distribusi Pendapatan dan Perekonomian Regional Provinsi Papua: Suatu Analisis Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi*. Disertasi Doktor Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Heriawan, R. 2004. *Peranan dan Dampak Pariwisata pada Perekonomian Indonesia . Suatu Pendekatan Model I–O dan Social Accounting Matrix*,. Disertasi Doktor Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hery S. 2007. *Dampak Kebijakan Ekonomi Di Sektor Agroindustri terhadap Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia, dengan Pendekatan Social Accounting Matrix*. Disertasi Doktor Institut Pertanian Bogor, Bogor.

- Hayami, Y. and V.W. Ruttan. 1971. *Agriculture Development: An International Perspective*. The Johns Hopkins Press, London.
- Hoover, E.M. and F. Giarratani. 2002. *An Introduction to Regional Economics*. Regional Research Institute West Virginia University.
- Isard, W., I.J. Azis, M.P. Drennan, R.E. Miller, S. Saltzman and E. Thorbecke. 1998. *Methods of Interregional and Regional Analysis*. Ashgate, Aldershot.
- Ismail, M. 1995. *Pertumbuhan dan Pemerataan, Analisis Teori dan Bukti Empirik*. Prisma, 24 (1): 3-15.
- Jennifer Chung – I Li. 2006. *Social Accounting Matrix (SAM) for Thailand, Trade and Macroeconomics Division International Food Policy Research Institute*. University Of North Caroline at Chapel Hill.
- Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasryno, F. dan J.F. Stepanek. 1985. *Dinamika Pembangunan Pedesaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Khan, H.A. and E. Thorbecke. 1989. *Macroeconomic Effects of Technology Choice: Multiplier and Structural Path Analysis Within a SAM Framework*. Journal of Policy Modelling, 11(1) : 131-156.
- Mankiw, G. 2003. *Macroeconomics. Fourth Edition*. Worth Publishers, New York.
- Nicholson, W. 2000. *Intermediate Microeconomics And Its Application*, Eight Edition. Harcourt College Publisher, Massachusetts.
- Nokkala, M. 2002. *Social Accounting Matrix and Sectoral Analysis: The Case of Agricultural Sector Investment in Zambia*. [Pakistan-report 10](#). pdf.
- Pyyat, G. and I.J. Round. 1985. *Social Accounting Matrix : A Basic For Planning*. The World bank, Washington, DC.
- Romer, D. 1996. *Advanced Macroeconomics*. The McGraw-Hill Companies, Inc, New York.
- Stabler, J, Papatheodorou, A, and Sinclair, M. 2010. *The Economics of Tourism*, Second Edition, Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge, 270 Madison Avenue, New York, NY 10016.

- Stynes J. Daniel. 2003. *Economic of Tourism*. International Journal.
- Sumartono. 1985. *Studi Analisis Keterkaitan dan Ketergantungan Sektor Pertanian dalam Struktur Perekonomian di Indonesia*: Tesis Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Thorbecke, E. 1985. *The Social Accounting Matrix and Consistency Type Planning Model, in A World Bank. Symposium Social Accounting Matrix Model* (Edited by Pyaat, G and J.I. Round). The World Bank, Washington, DC, USA PP. 207- 256.
- Thorbecke. E. and H.E. Babcock. 2000. *The Use Of Accounting Matrix in Modelling, Profesor of Economics and Food Economics*. Cornell University, Revised Version.
- Todaro, M.P. 2000. *Economic Development*. Sevent edition. Pearson Education Limited , New York.
- United Nation and World Tourism Organization, Recommendation and Tourism Statistics. New York, 1994.
- Wahyu, E.N. 2008. *Analisis Sumber Pertumbuhan, Keterkaitan dan Distribusi Pendapatan dalam Proses Perubahan Struktural Ekonomi*. Provinsi Jawa Barat. Disertasi Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Wagner, JE. 1999. *Development a Social Accounting Matrix to Examine Tourism in The Area de Protecao Ambiental de Guaraquecaba, Brazil*. Working Paper No. 58. Southeastern Center for Forest Economics Research. Research Triangle Park, Syracuse.
- Wie, T.K. 1981. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*. Beberapa Pendekatan Alternatif. LP3ES . PP. 3 – 36.
- Wood, K. (2005). *Pro-Poor Tourism as a Means of Sustainable Development in the Uctubamba Valley*. Northern Peru.
- World Tourism Organization. 1994. *Concepts, Difinitions and Clasifications for Tourism Statistics*. Technical Manual No.1. Collection of Tourism Expenditure, Madrid, Spain.
- _____. 1995. *The General Guidelines for Developing The tourism Satellite Account (TSA)*. Measuring of Total Tourism Demand Volume 1. WTO Departmen of Statistics Economic Measurement of Tourism. Madrid.

_____ 1995. *Concepts, Definitions and Classifications for Tourism Statistics*. Technical Manual No.1. World Tourism Organization, Madrid.

Yotopoulos, P.A. and J.B. Nugent. 1976. *Economics of Development: Empirical Investigation*. Harper International Edition, Times Printed Sdn. Bhd, Singapore.